

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Teori Stewardship

Teori *Stewardship* menggambarkan suatu situasi dimana para manajer tidak termotivasi pada tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang melainkan lebih ditekankan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori ini menjelaskan bahwa terdapat suatu hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Pada saat kepuasan dan kesuksesan organisasi telah terpenuhi maka pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada pada kelompok organisasi tersebut. Pada hal ini *stewards* yang digambarkan sebagai pemerintah memiliki hubungan dengan *principal* yang digambarkan sebagai masyarakat. Dengan adanya hubungan ini pemerintah yang memiliki informasi diharapkan mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat sesuai dengan harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Akuntansi organisasi sektor publik sendiri telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk hubungan *steward* dan *principal*.

b. Teori Signalling

Teori *signalling* menjelaskan pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah kepada masyarakat yang berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Signal pemerintah kepada masyarakat adalah dengan memberikan informasi-informasi baik keuangan maupun kinerja yang mereka lakukan pada *website* pemda. Hal ini dilakukan atas amanat yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah berusaha memberikan sinyal baik kepada masyarakat (Evans dan Patton 1987). Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terus mendukung pemerintah yang sedang berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kinerja pemerintahan yang baik dapat diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk pertanggungjawaban maupun promosi untuk tujuan politik.

c. Internet Reporting

Peraturan yang secara implisit menyebutkan tentang pemanfaatan media elektronik dalam mengungkap informasi kepada masyarakat antara lain PP No.6 Tahun 2008, PP No.3 Tahun 2007, dan Permendagri No.7A Tahun 2007. Pemerintah yang melakukan internet reporting telah memperlihatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Kierkegaard (2009) dalam Bertot,dkk (2010) menyatakan “*Transparency ultimately 3 serves to keep Government honest—good government must be seen to be done*”. Suatu pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi dapat dilihat dari ada dan tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka kepada masyarakat

dan pengguna lain dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Dengan demikian transparansi dapat dijadikan indikator adanya pengelolaan keuangan yang baik.

Internet Reporting yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggabungan antara internet *financial reporting* dan pengungkapan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP). Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat maka dalam hal ini pemerintah harus melaporkan laporan keuangan serta kinerja mereka pada *website* pemda agar masyarakat sebagai *principal* percaya kepada pemerintah. Hal ini sesuai dengan intruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ telah mengatur pedoman pelaporan anggaran pemda yang transparan dan akuntabel, intruksi ini mewajibkan pemda untuk memberikan informasi anggaran melalui *website* masing-masing pemda.

d. Kompetisi Politik

Kompetisi politik memperlihatkan seberapa besar persaingan antara kepala daerah dengan saingan politiknya. Kompetisi politik dapat diukur dengan perbandingan antara jumlah kandidat kepala daerah dengan kursi pemerintahan yang tersedia (laswad, dkk 2005). Dalam hal ini kompetisi politik merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada kepala daerah terpilih dalam mengungkapkan laporan keuangan dan kinerja kepada masyarakat.

Kompetisi politik yang terjadi menyebabkan pemerintah berhati-hati dalam mengungkapkan laporan keuangan dan kinerja mereka jika dipandang

buruk, karena disisi lain hal tersebut dapat dijadikan alat bagi pesaing politik lain untuk menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang sedang berjalan. Sebaliknya jika kinerja pemerintah baik maka hal ini dapat dijadikan alat bagi pemerintah yang berjalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Maka semakin tinggi level kompetisi politik, kecendrungan pemerintah daerah dalam menggunakan internet sebagai pelaporan informasi keuangan dan kinerja secara sukarela akan semakin tinggi (Rahman 2013).

e. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah dapat didefinisikan pada seberapa besar pendapatan asli daerah tersebut (Nosihana & Yaya 2016). PAD merupakan sumber keuangan yang berasal dari daerah itu sendiri. Sehingga kekayaan daerah yang tinggi dapat dilihat dari tingginya PAD suatu daerah. PAD juga menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatannya secara mandiri. Kinerja yang tinggi dari pemerintah merupakan sinyal dari pemerintah kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja dengan baik dan telah melakukan kewajiban yang sesuai.

Pendapatan asli daerah pada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia memiliki perbedaan. PAD yang rendah namun kekayaan daerah yang tinggi dapat menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang buruk. Sedangkan kekayaan daerah yang rendah namun PAD yang tinggi menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Hal ini menunjukkan

bahwa kekayaan daerah sebagai faktor pelaporan keuangan dan kinerja daerah pada *website* pemda.

f. Opini Audit

Opini Audit merupakan suatu laporan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma dan aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa (Tobing, 2004). Opini audit nantinya akan dijadikan alat pengukur kinerja pemda baik atau buruk. Terdapat lima (5) opini audit dalam laporan keuangan yaitu: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemda yang mendapatkan hasil opini audit WTP biasanya akan lebih cenderung untuk mempublikasikan laporan keuangannya agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja Pemda tersebut (Trisnawati dan Achmad, 2014).

Opini audit diukur dari ada dan tidak temuan audit. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus BPK terhadap laporan keuangan pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu pemerintah daerah. Adanya suatu temuan audit menyebabkan BPK meminta adanya pengungkapan yang lebih dari pemda. opini audit yang wajar akan menyebabkan pemerintah daerah tidak ragu dalam melaporkan keuangan dan kinerjanya pada *website* pemda.

g. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas kinerja mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. Dalam sudut pandang teori signaling pemda selaku agen akan berupaya mengurangi asimetri informasi keuangan dan kinerjanya dengan melaporkan laporan keuangan dan kinerja yang berkualitas pada *website* pemda. pada kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dinilai dengan predikat nilai A,B dan seterusnya. Hal ini menjadikan akuntabilitas kinerja dapat menjadi faktor internet reporting pemda.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yaitu LAKIP menunjukkan gambaran akuntabilitas kinerja mereka. Menurut Rahmawati (2013) menunjukkan bahwa akuntabilitas pemda berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemda. Untuk itu pemda harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang melaporkan LAKIP dengan predikat nilai yang baik bermaksud meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai *principal*.

2. Penurunan Hipotesis

a. Kompetisi Politik terhadap Internet reporting

Pada penelitian Rahman (2013) menyebutkan bahwa internet merupakan sarana yang paling mudah dan murah bagi pemerintah dalam melaporkan informasi keuangan dan kerja sebagai bukti kinerja mereka kepada masyarakat. Sesuai dengan teori *signalling* yang menjelaskan pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah kepada masyarakat yang berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat.

Intruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ telah mengatur pedoman pelaporan anggaran pemda yang transparan dan akuntabel, intruksi ini mewajibkan pemda untuk memberikan informasi anggaran melalui *website* masing-masing pemda. Hal ini menyebabkan pemerintah akan berhati-hati dalam melaporkan keuangan dan kinerja mereka pada *website* pemda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menyimpulkan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap internet reporting. Menurut Rahman (2013) Semakin tinggi kompetisi politik, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan yang mudah dan murah juga akan semakin tinggi.

Internet merupakan sarana yang mudah dan murah bagi pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan informasi mengenai kinerja dan keuangannya. Dengan adanya bukti bahwa pemerintah telah melakukan

transparansi dan akuntabilitas maka akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dengan kepercayaan masyarakat tersebut pejabat terpilih akan berekspektasi untuk memenangkan pemilu di periode berikutnya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap internet reporting

b. Kekayaan Daerah terhadap Internet Reporting

Kekayaan daerah dapat didefinisikan sebagai seberapa besar pendapatan asli daerah dari suatu daerah (Nosihana & Yaya 2016). PAD merupakan sumber keuangan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan demikian kekayaan daerah yang tinggi dapat dilihat dari tingginya PAD suatu daerah. PAD akan menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatannya dengan baik. Dengan demikian pemda akan berusaha menunjukkan kepada stakeholders sebagai signal bahwa telah mengelola kekayaan daerah dengan baik.

Hilmi dan Martani (2012) menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pelaporan keuangan pemerintah provinsi. Peningkatan pengungkapan terjadi karena pemerintah provinsi memiliki kekayaan yang lebih besar yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan. Dengan demikian jika terungkapnya kekayaan daerah pada pengungkapan, maka masyarakat akan memberikan kepercayaan mereka.

Masyarakat tentunya akan berfikir bahwa pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Kekayaan daerah yang besar akan menunjukkan pemerintah daerah yang baik dalam mengelolanya. Kekayaan daerah sendiri dapat dinilai dengan melihat besarnya PAD pada laporan keuangan pemerintah daerah (Nosihana & Yaya 2016). Dengan demikian pemerintah daerah akan sukarela dalam melaporkannya di internet agar masyarakat dapat melihat kinerja pmdanya yang baik. Akan tetapi sebaliknya jika kekayaan daerah kecil maka pemda akan menghindari pelaporan informasi melalui internet. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap internet reporting

c. Opini Audit terhadap Internet Reporting

Trisnawati dan Achmad (2014) menyebutkan bahwa Opini audit adalah salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini audit secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini audit yang diberikan kepada pemerintah daerah akan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan dan kinerja pemda. Pemda yang mendapatkan hasil opini audit WTP biasanya akan lebih cenderung untuk mempublishkan laporan keuangannya agar masyarakat mengetahui bagaimana

kinerja Pemda tersebut (Trisnawati dan Achmad, 2014). Pada penelitian Hilmi dan Martani (2012) menyatakan bahwa tingkat penyimpangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian pemda cenderung untuk memberikan informasi yang dimiliki di internet. Hal ini menunjukkan pemerintah memberikan signal kepada masyarakat bahwa telah melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

Laporan keuangan pemda yang telah di audit dan mendapatkan predikat tidak wajar, maka akan membuat pemerintah daerah tidak akan mempublikasikan laporannya di *website* pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Dengan kepercayaan masyarakat yang berkurang akan menimbulkan ekspektasi bagi pejabat terpilih bahwa tidak akan dipilih di periode berikutnya. Sebaliknya jika predikat audit wajar tanpa pengecualian maka pemda dengan sukarela akan menunjukkan laporan auditnya di internet. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut :

H3 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap internet reporting

d. Akuntabilitas Kinerja terhadap Internet Reporting

Akuntabilitas kinerja mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. Dalam sudut pandang teori signaling pemda selaku agen akan berupaya mengurangi asimetri informasi keuangan dan kinerjanya dengan

melaporkan laporan keuangan dan kinerja yang berkualitas pada *website* pemda.. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yaitu LAKIP menunjukkan gambaran akuntabilitas kinerja mereka.

Penelitian Rahmawati (2013) menunjukkan bahwa akuntabilitas pemda berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemda. Untuk itu pemda harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Dengan demikian jika pemerintah memanfaatkan internet sebagai pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerjanya maka hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan tingginya kepercayaan masyarakat pejabat terpilih akan memiliki kesempatan untuk dipilih pada periode berikutnya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut :

H4 : Akuntabilitas Kinerja berpengaruh positif terhadap internet reporting

3. Kerangka Teoritis

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

